



Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo

Antara Tertib Adminduk, Permudah Layanan, dan Pilkada

Tertib administrasi kependudukan (adminduk) menjadi kebutuhan. Sebab, hal itu berdampak terhadap banyak hal. Di antaranya terkait dengan fasilitasi layanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.



Dokumen kependudukan itu menjadi legalitas sebagai warga negara. Intinya, dengan tertib adminduk masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

TRI WALUKO
Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta



BUDAYA TERTIB:
 Seorang warga tengah mengurus salah satu administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Ini penting dipenuhi karena dokumen kependudukan menjadi bagian dari akses layanan publik kepada masyarakat.

KELENGKAPAN adminduk itu antara lain KTP, KK kartu identitas anak (KIA) maupun kartu izin tinggal terbatas (KITAS). "Dokumen kependudukan itu menjadi legalitas sebagai warga negara," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo kemarin (22/7). Soal fasilitasi layanan publik itu di antaranya hak ikut menerima bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Jika status penerima manfaat dalam program tersebut jelas, maka bansos bisa tepat sasaran. Kemudian juga dalam hal kepemilikan KIA. Tri meminta agar orang tua tertib mengurus identitas bagi anak-anaknya. Kepemilikan KIA memudahkan anak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, hingga transportasi. "Intinya, dengan tertib adminduk masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara," kata Tri. Dia meminta tertib masyarakat dalam hal adminduk juga perlu terus disosialisasikan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melalui berbagai sarana. Sosialisasi juga harus dibarengi dengan kemudahan aksesibilitas masyarakat mendapatkan layanan pengurusan adminduk. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta itu juga mengingatkan agar Pemkot Yogyakarta semakin masif menjalankan program mewujudkan tertib adminduk. Terlebih dalam waktu dekat ini Kota Yogyakarta akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada). Program jemput bola pembuatan KTP bagi masyarakat berusia 17 tahun pada November mendatang harus diintensifkan. Sebab, masyarakat dengan kategori tersebut rentan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pilkada mendatang. "Penduduk Kota Jogja harus dapat menggunakan hak suaranya memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan," harapnya. (Inu/kus/by)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005